

## **Reaktualisasi Perencanaan Partisipatif Bidang Sosial Keagamaan**

**Ruhyat**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
E-mail: [ruhyat.dakwah@gmail.com](mailto:ruhyat.dakwah@gmail.com)

### **Abstract**

*State issues vis a vis Religion has long been that since the age-old debate in Europe so that the effect on religious activity and religious behavior in a region or country. Accumulation of discourse is then crystallized in the discourse of civil society and European schools of Islamic schools. Islamic civilization can open a new bridge that articulate civil societies in the new format the results of elaboration of ideas of human and religious doctrines. In the broader scope of the universality of Islam can touch every civilization of the peoples of the world, including Indonesia. At the same time, issues of poverty and ignorance the people have not been exhausted discussed. Apparently will always come to the surface without any solution. Therefore, this phenomenon into the background the need for renewal of participatory planning among the community itself. Doctrinally Muslims understand that God does not change the fate of a people, so the people that change their own destiny.*

### **Kata Kunci:**

*religion, civillization, planning, and participatory.*

### **A. Partisipasi Masyarakat**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah sebuah pola ukur bagi suatu masyarakat melalui tiga indikator; pertama, daya beli masyarakat yaitu mengukur kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi hajat hidupnya dengan pengadaan sandang, pangan dan papan. Kedua, Angka Harapan Hidup atau aspek kesehatan yang secara ukuran medis menjadi tolak ukur korelasi antara usia dan kondisi kesehatan jasmani dan rohani suatu masyarakat. Ketiga, Melek Huruf atau aspek pendidikan yang merepresentasikan tingkat intelegualitas suatu masyarakat. Adapun

Millenium Development Goals adalah issue global dalam orientasi tujuan pembangunan abad millenium dalam kerangka mendorong kemajuan masyarakat dunia. Mulai tahun 2015 konsep MDG's dikembangkan menjadi Sustainable Development Goals (SDG's) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diketuai oleh Prof. Dr. Din Syamsuddin. Terdapat 8 isu SDGs yaitu: 1). Kemiskinan dan kelaparan. 2). Pendidikan untuk semua. 3). Kesetaraan gender. 4). Kesehatan dan kematian ibu hamil. 5). Meningkatkan kesehatan balita. 6). Penanggulangan penyakit menular. 7). Kelestarian lingkungan hidup. 8). Kemitraan global.

Kemiskinan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Namun bila kondisinya mewabah seperti pada era krisis ekonomi tahun 1998 secara dominan dipengaruhi oleh fenomena dehumanisasi yang bermuara pada nilai-nilai luhur moral manusia. Oleh karena itu, untuk mengejawantahkan nilai-nilai universal kemanusiaan atau Nilai-Nilai Luhur Kemanusiaan (N2LK) seperti nilai kejujuran, keadilan, kerelawanan/keikhlasan, tanggungjawab, kepedulian, keterbukaan, kesetaraan, dan kesatuan dalam keragaman. Ini dipandang sebagai gerakan moral yang niscaya terjadi sebagai modal dasar masyarakat (*capital social*) dalam membangun tatanan kehidupan masyarakat yang baik di atas landasan prinsip-prinsip universal kemasyarakatan untuk mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam hal ini, *good governance* mendorong hubungan yang baik antara tiga komponen masyarakat yaitu pemerintah, masyarakat dan pihak swasta atau pengusaha. Hubungan antara ketiganya itu dilandasi di atas prinsip demokrasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, dan desentralisasi.

Partisipasi adalah keterlibatan seluruh komponen dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang sudah ditentukan. Partisipasi memposisikan setiap manusia dalam posisi sejajar atau setara agar terjadi proses pemberdayaan dalam sistem sosial yang terbangun.

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan) (Suharto, 2005: 7). Konsep mengenai kekuasaan merupakan ide utama dalam hal pemberdayaan. Kekuasaan sendiri selalu diartikan sebagai kemampuan untuk mengatur orang lain sesuai dengan yang kita inginkan. Pemberdayaan berdasarkan perspektif sosiologi adalah menampilkan peran-peran aktif dan kolaboratif antara masyarakat dan mitranya (Hikmat, 2006). Adanya kerja sama yang saling

berkesinambungan dan melaksanakan tugasnya masing-masing sehingga proses *empowerment* bisa berjalan.

Secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan—atau setidaknya diserupakan—dengan istilah pengembangan (Safei dan Mechendrawaty, 2003: 42). Konsepsi pengembangan sebagai pemberdayaan didasarkan pada penguatan kualitatif yang dilakukan fasilitator kepada kelompok atau komunitas masyarakat.

Definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses dan cara-cara pemberdayaan:

- 1) Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung,
- 2) Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang dipengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya,
- 3) Pemberdayaan merujuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial,
- 4) Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Safei dan Machendrawaty, 2003: 59).

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yaitu yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*" (Hafsah, 2006: 136).

*People centered* merupakan tatanan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan masyarakat dan dalam prosesnya pun dominan dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat diposisikan sebagai pemeran utama dalam melakukan pengambilan keputusan, pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus pengawasan dan pertanggungjawaban secara terbuka dilakukan oleh dari dan untuk masyarakat. Konsepsi *people centered* ini relevan dengan ruh demokrasi yang juga mensyaratkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan

setiap harapan dan cita-cita masyarakat itu sendiri. Tentunya, proses tersebut akan sulit dilakukan tanpa cara-cara tertentu bahkan metodologi tertentu. Oleh karena itu *empowering* menjadi mutlak dilakukan sebagai perangkat metode-metode yang dapat memudahkan masyarakat dalam mewujudkan harapan dan cita-citanya. Syarat lain yang tidak kalah penting adalah bagaimana konsep *people centered*, *participatory* dan *empowering* itu diketahui, dipahami dan tersosialisasikan secara merata kepada masyarakat, maka dalam paradigma baru pembangunan juga mensyaratkan *sustainability* atau keberlanjutan proses dalam setiap ruang dan waktu. Pada proses ini, masyarakat akan melakukan pembangunan melalui siklus program yang pada proses pelaksanaannya melalui tahapan-tahapan tertentu yang dirancang secara *sustainable*.

Pada kenyataan proses pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat tetapi juga harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat dan bahkan pada negara yang menganut *theisme* akan mengembalikan pada nilai-nilai ketuhanan atau dalam konsep Islam disebut sebagai nilai-nilai ilahiyah.

## **B. Tujuan Partisipasi**

*Goals* atau tujuan partisipasi adalah untuk mewujudkan keberdayaan, yaitu untuk mengangkat orang tidak berdaya supaya keluar dari ketidakberdayaannya. Lebih daripada itu, partisipasi dalam pemberdayaan bertujuan mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan dengan kata lain pemberdayaan adalah proses pendidikan secara terbuka dalam kehidupan bermasyarakat yang berujung pada upaya memanusiaikan manusia. Adapun secara khusus, yang menjadi tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan. Adapun pengelompokan yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- 1) Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender maupun etnis
- 2) Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing

- 3) Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga (Suharto, 2005: 60).

Namun pemberdayaan kelompok lemah tersebut tetap bukan tujuan utama, karena dalam konteks pemberdayaan mutlak untuk melibatkan seluruh komponen untuk turut berpartisipasi menanggulangi masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Sehingga, kemiskinan, kebodohan, masyarakat marginal dan sebagainya hanya menjadi pemicu untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Dengan demikian perubahan paradigma yang perlu dibangun dalam memahami tujuan pemberdayaan dimulai dari karakteristik masyarakat berdaya. Sebagaimana telah disampaikan pembahasan awal bahwa pemberdayaan atau *empowerment/empowering* adalah proses penguatan masyarakat dengan cara mendorong (motivasi), menjembatani (fasilitasi dan mediasi), serta mendampingi (advokasi) dalam meraih tujuan-tujuan yang baik di masyarakat. Dalam konteks dakwah, pemberdayaan disebut sebagai *tamkiinu al-Dakwah* yang memiliki makna kekuatan, kekuasaan, kepedulian dan kemauan yang keras (Yusuf, 2007: 6).

Contoh yang paling sederhana menggambarkan sosok sederhana dari masyarakat berdaya adalah seperti Mak Eroh Tasikmalaya, Seorang nenek yang tidak pantang menyerah walaupun sudah berulang kali mengusulkan kepada pemerintahan setempat agar berupaya mencangkan program pengadaan saluran air irigasi agar dapat menanggulangi *paceklik* di musim kemarau karena kurangnya respon pemerintah saat itu, mak Eroh kemudian bersama segelintir keluarga dan masyarakat yang peduli saat itu menggali saluran air yang cukup panjang dan menembus gunung dengan membuat terowongan air hingga air pun mengalir sampai jauh. Dengan upaya ini mak Eroh dikemudian hari oleh pemerintah Orde Baru saat itu diberikan penghargaan berupa Kalpataru pada tahun 1988. Mak Eroh tidak meminta tarif atau bayaran sedikitpun dari masyarakat dan pemerintah walaupun kondisi ekonominya lemah sawah yang diairi dari salurannya pun tidak luas, tetapi masyarakat mendapatkan manfaat dari segala upaya yang dilakukan Mak Eroh.

Mak Eroh adalah sosok manusia berdaya yang karakteristiknya peduli terhadap lingkungan dan sesama, responsif terhadap

penanggulangan masalah dan eksistensinya memberikan manfaat kepada masyarakat.

Paradigma pemberdayaan yang sebelumnya banyak dipersepsi syarat dengan kemiskinan maka perlu ada kesamaan pandangan yang komprehensif bahwa kemiskinan  $\neq$  tidak berdaya dan kaya  $\neq$  berdaya. Oleh karena itu, tujuan pemberdayaan adalah segala upaya untuk mewujudkan masyarakat miskin yang berdaya dan masyarakat yang kaya tapi berdaya.

Arah pemberdayaan diharapkan tepat pada sasaran yang dimulai dari kemiskinan dan simbol-simbol ketidakberdayaan lainnya. Sasaran pemberdayaan dilihat dari segi penyandang masalah kesejahteraan sosial, yaitu:

- 1) Kemiskinan, yaitu penduduk Indonesia yang termasuk kategori fakir miskin
- 2) Ketelantaran, yaitu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yang melanda anak-anak, perempuan dan lanjut usia, gelandangan dan pengemis
- 3) Kecacatan baik cacat secara fisik ataupun cacat secara mental
- 4) Ketuna-sosialan, yaitu kondisi disharmonisasi dengan nilai susila dan sosial budaya yang umum berlaku di masyarakat
- 5) Bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial (Shamdan, 2004: 21).

Jika kajian pemberdayaan dimulai dari kemiskinan, Sennet dan Cabb dan Conway menyatakan bahwa ketidakberdayaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: ketiadaan jaminan ekonomi, arena politik, akses terhadap informasi, dukungan finansial, pelatihan-pelatihan dan adanya ketegangan fisik atau emosional (Suharto, 2005: 61). Hal ini dapat menjadi titik tolak untuk menggugah kesadaran si miskin dan si kaya untuk melaksanakan proses pemberdayaan.

Pemahaman terhadap penyebab-penyebab kemiskinan penting untuk dilakukan olah pikir dan olah rasa oleh masyarakat terutama masyarakat miskin. Diharapkan dari hal tersebut cara pandang masyarakat berubah sehingga akan berimplikasi pada:

- a. Kesadaran bahwa seharusnya mereka tidak menjadi bagian yang menambah persoalan, tetapi merupakan bagian dari pemecahan masalah dengan cara berkehendak untuk memelihara nilai nilai luhur kemanusiaan.

- b. Tumbuhnya pemahaman bahwa sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur.
- c. Merupakan awal dari tumbuhnya modal sosial, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan pihak luar terhadap masyarakat setempat.
- d. Tumbuhnya kesadaran untuk melakukan upaya perbaikan, yang dimulai dari diri sendiri.

Sehingga setiap anggota masyarakat seharusnya mampu untuk memberikan sumbangan (baik tenaga, waktu, pikiran, ruang bagi kelompok lain untuk berpartisipasi, berdemokrasi, dsb) untuk bersama-sama menanggulangi masalah kemiskinan (baca: untuk kesejahteraan masyarakat) (Nes, 2008: 8).

### C. Strategi Partisipasi

Ada tiga strategi utama partisipasi dalam praktek perubahan sosial untuk pemberdayaan, yaitu tradisional, *direct action* (aksi langsung), dan transformasi (Hikmat, 2006: 19). *Pertama*, strategi tradisional menekankan pada kebebasan dalam memilih kepentingan dengan sebaik-baiknya dalam berbagai keadaan. Kebebasan yang dimaksud pada strategi tradisional sangat umum sehingga terlampaui seakan mewacana tetapi akan muncul tindakan-tindakan yang real dari sekelompok orang yang berkuasa (cenderung *oligarkis*). *Kedua*, *direct action* atau tindakan langsung, yaitu dimunculkannya dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat dan mempunyai peluang yang besar untuk terjadinya perubahan. Kondisi seperti ini dapat diawali oleh kebutuhan dasar kolektif (*basic need collectivity*) dari masyarakat seperti tuntutan reformasi supaya keluar dari krisis multidimensi. *Ketiga*, strategi pemberdayaan transformatif yaitu pemberdayaan yang berbasis pendidikan masyarakat secara partisipatif yang menekankan kesadaran-kesadaran kritis untuk menjunjung nilai-nilai kebersamaan dan hubungan yang mutualistik.

Ketiga strategi pemberdayaan ini dalam pendekatan filsafat dialektika terjadi seperti siklus yang selalu berulang tidak putus mulai dari tesis, anti-tesis dan kemudian sintesis. Proses pemberdayaan pada umumnya dilakukan secara kolektif (Suharto, 2005: 66). Namun pada praktik dilapangan, strategi pemberdayaan dapat juga dilakukan secara individual, meskipun pada dasarnya strategi ini tetap melibatkan unsur

kolektivitas. Terdapat tiga tingkat dalam pendekatan strategi pemberdayaan yaitu: *mikro*, *mezzo* dan *makro* (Hikmat, 2006: 16). Dengan adanya ketiga strategi tersebut bisa dijadikan sebagai acuan dalam pemecahan masalah yang disesuaikan dengan kapasitas masyarakat.

#### **D. Sasaran Partisipasi**

Indikator tingkat partisipasi merupakan alat ukur untuk menentukan seseorang itu berdaya atau tidak dalam keterlibatan di masyarakat, sehingga bisa mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural politis (Suharto, 2005: 63).

Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan, yaitu:

- a. Kebebasan mobilitas, kemampuan individu untuk keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas media, bioskop, rumah ibadah, ketetangaan. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian,
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu); kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, rokok, bedak, shampo). Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri
- c. Kemampuan membeli komoditas besar; kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, majalah, pakaian keluarga. Seperti halnya indikator di atas, poin tinggi diberikan kepada individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya; terlebih jika ia dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri,



- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama istri/suami mengenai keputusan-keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditenak, memperoleh kredit usaha ,
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai apakah dalam satu tahun terakhir ada seseorang (suami/istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan, dari dia tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang bekerja di luar rumah,
- f. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang DPR setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris,
- g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap 'berdaya' jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes, misalnya, terhadap suami yang memukul istri; istri yang mengabaikan tugas suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah,
- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga: memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan, seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aset-aset tersebut secara tersendiri atau terpisah dari pasangannya (Suharto, 2005: 66).

Dari delapan indikator tersebut dapat diketahui bahwa sasaran dari pemberdayaan adalah seluruh masyarakat dengan memprioritaskan pemberdayaan pada masyarakat tertindas yang lemah (*kaum mustadz'afiin*). Korelasi yang dapat diwujudkan adalah pada syarat-syarat pemberdayaan yang mengharuskan partisipasi dan kental dengan suasana demokrasi. Pada masyarakat demokratis akan menghasilkan tekanan secara *bottom-up* dari kaum *mustadz'afiin* yang tentunya secara kuantitas lebih banyak daripada kelompok pemerintahan yang pada suasana kemiskinan dipandang kelompok orang-orang kaya yang *dzalim* (*kaum muthrafiin*).

Nilai-nilai untuk mewujudkan kesejahteraan secara dinamis dilakukan oleh para pemikir. Vic George & Paul Wilding menyebut kelompok-kelompok yang melakukan bongkar pasang atas nilai itu dengan golongan antikolektivis, golongan antikolektivis setengah hati, golongan sosialis fabian dan golongan Marxis (1992: 10). Harapan ideal

dari proses pemberdayaan adalah munculnya kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dari seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Golongan antikolektivis adalah golongan yang menganut faham liberalisme yaitu golongan yang mengumandangkan kemerdekaan individualisme dan ketidaksamaan merupakan nilai-nilai sosial yang hakiki (George dan Wilding, 1992: 36). Adapun golongan antikolektivis setengah hati (*reluctant collectivities*) adalah sama dengan golongan antikolektivis tetapi golongan ini tidak begitu mempertahankan nilai-nilai yang mutlak karena kecenderungan pada pragmatisme intelektual (George dan Wilding, 1992: 69-70). Sedangkan golongan sosialis fabian adalah golongan yang percaya bahwa kapitalisme dapat ditransformasikan secara damai menjadi sosialisme (George dan Wilding, 1992: 104). Dan golongan marxis adalah golongan yang menekankan pada perubahan social disandarkan pada prinsip kebebasan sipil dan persamaan di bidang ekonomi. Dalam pengertian yang luas, persamaan biasanya meliputi; pertama, tidak adanya hak istimewa, dan kedua, bahwa kesempatan yang memadai dibiarkan terbuka bagi semua orang (George dan Wilding, 1992: 106-107).

#### **E. Target Partisipasi**

Partisipasi untuk pemberdayaan hanya dapat dilakukan dengan sempurna jika ada *political will* dan *good will* dari seluruh *stakeholder* yang ada pada suatu masyarakat, yang pada gilirannya akan muncul target-target capaian pemberdayaan. Diantaranya target yang paling fundamental adalah penanggulangan kemiskinan melalui berbagai aktivitas ekonomi. Target selanjutnya adalah menumbuhkembangkan kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan melalui aktivitas-aktivitas sosial dan terakhir proses difusi kesadaran pembangunan dalam bentuk gerakan kolektif melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan-kegiatan pembangunan baik yang bersifat fisik maupun non-fisik.

Dalam konteks kekinian, Indonesia menetapkan target-target pemberdayaan yang mengacu pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan agenda *Millenium Development Goal's* (MDG's). Secara khusus di Propinsi Jawa Barat diarahkan untuk mencapai kategori maju pada skala yang telah ditetapkan *United Nations Development Programme* (UNDP) sebesar 80 pada tahun 2015. Adapun capaian pada tahun 2009

meningkat sebesar 0,53 poin dari tahun 2008, yaitu sebesar 71,50 (angka sementara hasil perhitungan BPS Provinsi Jawa Barat, maret 2010), Bila dibandingkan dengan target IPM Jawa Barat tahun 2015 yang sebesar 80,00 maka rata-rata capaian setiap tahunnya harus mencapai angka 1,4 pon dihitung sejak tahun 2009 (Puradimaja, 2010: II-1). Target capaian tersebut dikejar salah satu metodenya melalui pemberdayaan seiring dengan visi misi Pemerintah Republik Indonesia yang ingin mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan (Bappenas, 2010: 2).

Dalam konteks global, negara-negara maju mendapatkan masa kemajuannya melalui perwujudan tatanan pemerintahan yang baik melalui konsep *civil society*. Baik pengertian masyarakat sipil ataupun masyarakat madani, keduanya mempunyai ruh yang sama yaitu sebuah upaya perwujudan tatanan masyarakat yang berperadaban, teratur dan menjunjung supremasi hukum dalam berbagai aspek kehidupan agar terbentuk kesadaran kolektif dalam keberjalanan sistem pemerintahannya itu.

#### **F. Kegiatan Keagamaan**

Dalam wacana baku ilmu sosial pada dasarnya masyarakat sipil dipahami sebagai antitesa dari “masyarakat politik” atau negara. Pemikiran itu dapat dilacak dari pendapatnya Hobbes, Locke, Montesquieu, Hegel, Marx, Gramsci dan lain-lain. Pemikiran mengenai masyarakat sipil tumbuh dan berkembang sebagai bentuk koreksi radikal kepada eksistensi negara karena peranannya yang cenderung menjadi alat kapitalisme.

Substansi pembahasannya terletak pada penggugatan hegemoni negara dalam melanggengkan kekuatan kelompok kapitalis dengan memarjinalkan peran masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah kekuatan non-pemerintah yang mampu mengimbangi dan mencegah kekuatan negara untuk mengurangi tekanan-tekanan yang tidak adil kepada rakyatnya. Akan tetapi di sisi lain, mendukung peran pemerintah dalam menjadi juru damai dan penjaga keamanan dari kemungkinan konflik-konflik antar kepentingan dalam masyarakat. Dengan kata lain perlu adanya reposisi struktural dan kultural antar komponen dalam masyarakat, sederhananya, “serahkan urusan rakyat pada rakyat, dan posisikan pemerintah sebagai pejaga malam”.

Isu Negara vis a vis Agama telah lama menjadi perbincangan yaitu sejak zaman renaissance di Eropa sehingga berpengaruh pada kegiatan keagamaan dan perilaku keagamaan di suatu wilayah atau negara tersebut. Akumulasi wacana tersebut kemudian mengkristal pada wacana civil society madzhab eropa dan madzhab Islam.

Karena nuansa Islam yang dipandang resisten terhadap isu-isu global kontemporer, seringkali para ilmuwan dan para sosiolog modern enggan untuk mengakui bahwa *brand* (merk) dari konsepsi *civil society* berawal dari masyarakat madinah. Walaupun demikian, Rousseau dalam teori *Sosial Contract*-nya tidak lepas dari pengaruh Islam. Bahkan dia secara jelas menyebut: “Muhammad memiliki kekuatan besar yang mampu menjaga persatuan dalam sistem politik masyarakatnya, dan selama pemerintahannya mampu melahirkan kekhilafahan yang dapat mewarisi kesuksesannya, pemerintah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, hal inilah yang membuat masyarakat muslim semakin berkembang.” (Azizy, 2000: 94). Sebuah pengakuan yang jujur dari seorang ilmuwan Eropa.

Masyarakat sipil adalah terjemahan dari *civil society*. Konsep civil society lahir dan berkembang dari sejarah pergumulan masyarakat. Cicero adalah filosof dan orator yang pertama kali menggunakan kata “*societies civilis*” dalam filsafat politiknya. Konsep *civil society* pertama kali dipahami sebagai negara (state). Secara historis, istilah *civil society* berakar dari pemikir Montesque, JJ. Rousseau, John Locke, dan Hubbes. Ketiga orang ini mulai menata suatu bangunan masyarakat sipil yang mampu mencairkan otoritarian kekuasaan monarki-absolut dan ortodoksi gereja (Diamond, 2000).

Pada ruang modal sosial, konsep civil society mendapat tempat yang tak terbantahkan sebagai perangkat lunak yang memiliki kekuatan besar (soft power) untuk mendorong kebijakan-kebijakan public yang mengedepankan kepentingan kemanusiaan (humanisme). Sehingga dengan soft power itu dapat menumbuhkembangkan kesadaran kritis. Dengan kritik-kritik itu masyarakat eropa yang semula berada dalam keterkungkungan dan kejumudan tirani kaum gereja menjadi bangkit dan menemukan masa pencerahannya.

Sosiologi dan teori kemasyarakatan disusun berdasarkan perkembangan intelektual manusia melalui konteks sejarah sendiri—selama akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20—setelah revolusi politik di Eropa dan kebangkitan proses industrialisasi. Robert Nisbet

menjelaskan periode ini sebagai satu dari dua revolusi besar, yaitu revolusi industri (Inggris) dan revolusi politik (Prancis) (Kinloch, 2005: 42).

Perubahan radikal yang terjadi pada rentang sejarah yang cukup cepat di Eropa merupakan anti-tesis dari tradisi gereja yang menkooptasi kekuasaan negara hingga terdorong pada perubahan paradigma masyarakat Eropa untuk menyeimbangkan system kemasyarakatan dengan tradisi intelektual dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan berbagai cara termasuk yang paling dominan melalui filsafat.

Montesquieu dalam tulisannya *De l'esprit des lois* tahun 1748 menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia adalah lingkungan geografi, cuaca, jiwa, tradisi dan sebagainya. Pada abad-19 dikenal dengan abad empiris, Psikologi, Antropologi, Ekonomi, Geograf, Ilmu Hukum, Ilmu Politik dan Sosiologi lahir sebelum akhir abad-18.

Terlepas dari adanya sekat antara Islam dan Barat yang seringkali dibentur-benturkan seperti halnya dilakukan oleh Samuel P. Huntington, peradaban Eropa telah mengawali kemajuannya dengan membuka sekat-sekat psikologi sosial dan membongkar gembok kekakuan dalam pengakuan pada setiap khazanah ilmu pengetahuan untuk mewujudkan masyarakat yang berperadaban yang dalam konsepsi lebih umum disebut sebagai *civil society* atau masyarakat sipil. Perbedaan antara keduanya adalah latar belakang teologis.

Menurut Ahmad Syafi'i Ma'arif, masyarakat sipil yang berkembang dalam masyarakat Barat secara teoritis bercorak egalitarian, toleran, dan terbuka—nilai-nilai yang juga dimiliki oleh masyarakat Madinah hasil bentukan Rasulullah. Masyarakat sipil lahir dan berkembang dalam asuhan liberalisme sehingga hasil masyarakat yang dihasilkannya pun lebih menekankan peranan dan kebebasan individu, persoalan keadilan sosial dan ekonomi masih tanda tanya. Sedangkan dalam masyarakat madani, keadilan adalah satu pilar utamanya.

Perbedaan lain antara *civil society* dan masyarakat madani adalah *civil society* merupakan buah modernitas, sedangkan modernitas adalah buah dari gerakan Renaisans; gerakan masyarakat sekuler yang meminggirkan Tuhan. Sehingga *civil society* mempunyai moral-transendental yang rapuh karena meninggalkan Tuhan. Sedangkan masyarakat madani lahir dari dalam buaian dan asuhan petunjuk Tuhan.

Dari alasan ini Maarif mendefinisikan masyarakat madani sebagai sebuah masyarakat yang terbuka, egalitar, dan toleran atas landasan nilai-nilai etik-moral transendental yang bersumber dari wahyu Allah (Maarif, 2004: 84).

Islam dapat membuka jembatan peradaban baru yang mendialogkan civil society dalam format baru hasil elaborasi dari gagasan-gagasan manusia dan doktrin agama. Pada ruang lingkup yang lebih luas universalitas ajaran Islam dapat menyentuh setiap peradaban bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia.

Indonesia dikonsepsikan dan dibangun sebagai *multicultural nation-state* dalam konteks negara-kebangsaan Indonesia modern. Dengan kata lain, Indonesia tidak dimaksudkan untuk dibangun dan dikembangkan sebagai *monocultural nation-state*. Hal itu dapat dicermati dari dinamika konstitusional dan praksis kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai saat ini. yang mengacu pada konstitusi yang pernah dan sedang berlaku, yakni UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUDS 1950. Demikian pula dalam instrumentasi dan praksis kehidupan berbangsa dan bernegara serta bermasyarakat yang menjadi dampak langsung dan dampak pengiring dari berlakunya setiap konstitusi, serta dampak perkembangan internasional pada setiap zamannya (Winataputra, 2000).

Wacana multi-kulturalisme dalam konteks global memantapkan mozaik civil society setelah wacana itu mengemuka dan mendapat perhatian hingga menjadi kajian intelektual yang turut berfungsi menambah energi dalam membangun tatanan masyarakat dunia yang beradab dan dilandasi atas prinsip-prinsip dan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Multikulturalisme dihadirkan dalam suasana kemajemukan dibingkai dengan demokrasi dan penegakan hukum (*law enforcement*).

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam mengembangkan sistem hukum nasional adalah adanya pluralisme hukum, terutama dalam konteks ini adalah antara hukum nasional dan hukum agama, terutama hukum Islam sebagai bagian dari ajaran agama Islam yang dianut oleh mayoritas warga negara Indonesia (Asshidiqie, 2007: 3).

Terkait dengan multikulturalisme, pluralisme hukum di Indonesia yang terdapat dalam hukum nasional harus secara bijak menjadi muara

yang adil dari latar belakang bangsa Indonesia yang multikultural. Walaupun Islam sebagai agama yang pemeluknya mayoritas melalui universalitas ajarannya, Islam diyakini oleh para pemeluknya dengan lentur dapat menjadi perekat dan *rahmatan lil'alamiin*.

Potret masyarakat Indonesia, kedewasaannya diperoleh dengan menekankan bahwa sikap partikularitas dan universalitas Pancasila yang ada bukan hanya hak-hak melainkan juga kewajiban-kewajiban individual/sosial (Madjid, 2007: 132). Atas dasar itu para pendahulu bangsa Indonesia dalam perjuangannya menanamkan nilai-nilai luhur kemanusiaan dengan semangat anti penjajahan karena telah merasakan pahitnya dijajah. Seiring dengan itu, pasca-kemerdekaan RI tahun 1945 pembangunan bangsa dilakukan dengan mobilitas keswadayaan yang cukup tinggi dengan semangat teologis sebagai bentuk pengakuan atas ketidakberdayaan dihadapan Tuhan, kemanusiaan dengan penuh kasih sayang kepada sesama, persatuan, gotong royong, kepedulian terhadap diri sendiri dan sesama, menjunjung tinggi keadilan sosial sebagai representasi dari kekuatan dan keberdayaan manusia dihadapan makhluk lainnya. Nilai-nilai tersebut merupakan harapan atas tafsir dari masyarakat madani di Indonesia untuk diejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun pada realitas kekinian nampak jelas bahwa harapan tersebut belum terwujud. Ini dimungkinkan oleh tiga asumsi dasar. Pertama, dimungkinkan ada kesalahan dalam sistem pemerintahan. Kedua, belum nampaknya hasil yang diinginkan karena masih pada proses perbaikan untuk kemajuan. Ketiga, terjadi *human eror permanent*, Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang menolak kemajuan melalui konsep modern masyarakat madani yang mensyaratkan *sosial capital*. Dari ketiga asumsi tersebut, yang paling mungkin adalah asumsi kedua, sehingga bangsa Indonesia membuka ruang kepada dirinya untuk "*bertaubat*" mengganti setiap perilaku menyimpang dan sesatnya menjadi perilaku yang baik dengan harapan terciptanya proses dan hasil yang baik (*good citizenship*).

Pada perkembangannya, *good citizenship* dapat diwujudkan dengan kesadaran kolektif masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan dirinya dalam berbagai aspek baik ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan, maupun pertahanan dan keamanan. Hal itu untuk mewujudkan cita-cita bersama yaitu mewujudkan kesejahteraan bersama dengan meningkatkan taraf hidup yang lebih manusiawi.

Adapun modal yang dapat diandalkan yaitu modal material berupa harta benda, modal sosial yaitu nilai-nilai kebersamaan yang terdapat pada masyarakat itu dan modal spritual yaitu modal nilai-nilai yang terpancar dari fitrah kemanusiaan seperti nilai kepercayaan, jujur, adil, tanggung jawab, peduli dan kasih sayang. Adapun problematika dari modal spiritual ialah pada cara mengeksplorasi dan membangun nilai-nilai tersebut agar muncul dan mengakumulasi menjadi modal untuk mewujudkan berbagai program dan kegiatan positif masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat, bersumber dari masyarakat dan bernilai guna untuk masyarakat.

Salah satu cara mengatasi problematika tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan keagamaan yang dapat menyatukan antara aktifitas keagamaan dan kajian tentang ilmu keagamaan. Proses integralisasi ini diyakini dapat dengan mudah mengeksplorasi berbagai kebutuhan, masalah dan potensi yang ada di masyarakat beragama. Pada gilirannya model aktifitas keagamaan dapat menjadi stimulus dan sekaligus menjadi bahan untuk mengorganisasi masalah untuk kemudian direspon dalam bentuk tindakan nyata yang dirancang secara bersama, dilakukan bersama dan dinikmati hasilnya secara bersama (partisipatif).[]

#### DAFTAR PUSTAKA

- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama
- Hikmat, Harry. (2006). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora
- Safei, Agus Ahmad dan Machendrawati, Nanih. (2003). *Pengembangan masyarakat Islam Dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Hafsah, M. Jafar. (2006). *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Iris Press
- Yusuf, Muhammad Sayyid Muhammad. (2007). *Al-tamkiin li al-ummati al-Islamiyah*, Al-Azhar: Dar al-Salam



- Shamdan, Agus. (2004). *Indikator Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Ditinjau dari Aspek Ketahanan Sosial Masyarakat*, Jakarta: Departemen Sosial RI
- Nes, Marnia. (2008). *Modul Review Pelaksanaan Siklus PNPM Mandiri Perkotaan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum
- George, Vic & Wilding, Paul. (1992). *Ideologi dan Kesejahteraan Rakyat*, Jakarta: Grafiti
- Puradimaja, Deny Juanda. (2010) *Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2011*, Bandung: Bappeda Jabar
- Menteri PPN/ Kepala Bappenas, (2010). *Rancangan Awal; Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011*, Bandung: Bappenas
- Azizi, A. Qodri. (2000). *Masyarakat Madani antara Cita dan Fakta.. Dalam Ismail SM, Pendidikan Islam, Demokratisasi dan Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Diamond, Larry (2003) dalam Deny Suito, *Membangun Masyarakat Madani*, h. 278
- Kinloch, Graham C. (2005) *Perkembangan dan Paradigma Utama, Teori Sosiologi*, Bandung: Pustaka Setia
- Maarif, A. Syafii. (2004) *Meretas Jalan Teologia Agama-Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Tim Balitbang PGI
- Winataputra, Udin Sarifudin. (2000). *Multikulturalisme-Bhinneka Tunggal Ika dalam Perspektif; Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia*, Jakarta: IKIP
- Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Pembangunan Sistem Hukum Nasional, Hukum Islam dan Integrasi Pendidikan Hukum*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi, 2007<sup>1</sup> *Ibid.*
- Madjid, Nurcholish, dkk., (2007). *Islam Universal*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar